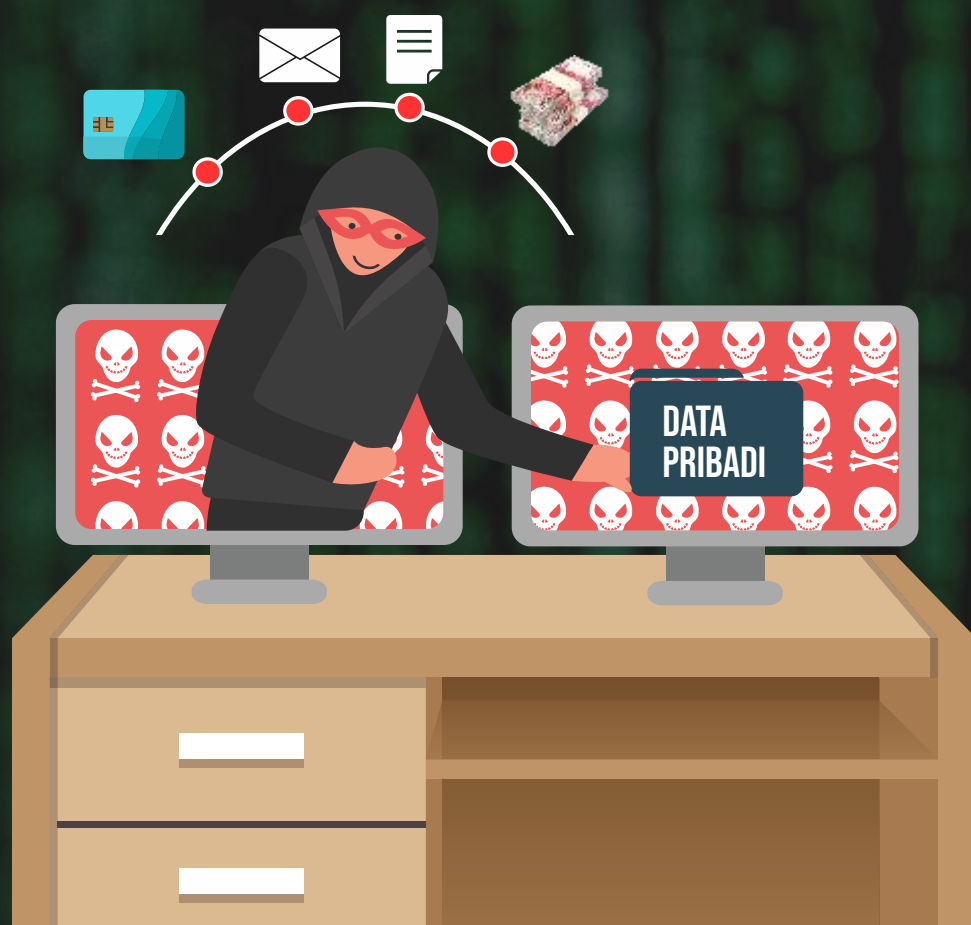




KARUT MARUT PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

1,3 Juta ID Pengguna eHAC Kemenkes Bocor, Kejahatan Phishing Mengintai



Mau-tidak mau, suka-tidak suka saat pandemi Covid-19 menerjang Indonesia, warga yang hendak berpergian menggunakan moda transportasi udara wajib menginstal dan mengisi data di aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sayangnya, identitas pribadi warga negara yang harusnya dilindungi malah bocor. Dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna eHAC dilaporkan pertama kali oleh siber vpnMentor sejak Juli 2021 lalu. Respon pemerintah pun disorot dan terkesan terlambat. Sebab baru heboh dan panik dengan meminta eHac di hapus dari gadget masyarakat di akhir Agustus ini. Padahal semua yang terekam dalam aplikasi tersebut merupakan data super-penting setiap individu. ID pengguna yang berisi nomor kartu tanda penduduk (KTP), paspor serta data dan hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan dan foto terekspos lengkap. Meski bahaya pelaku kejahatan phishing mengintai, tapi warga bisa apa? Sebab, payung hukumnya pun --RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP)--mandek di meja para pejabat negeri ini.

Baca Hal 11

RENTETAN KASUS KEBOCORAN DATA DI INDONESIA

Electronic Health Alert Card (eHAC) Kemenkes

Pada 31 Agustus 2021, peneliti dari vpnMentor mengungkapkan kebocoran data lebih dari 1,4 juta identitas masyarakat dengan ukuran mencapai 2 GB. Adapun data dari 226 rumah sakit dan klinik di seluruh Indonesia serta nama orang yang bertanggung jawab untuk menguji setiap pelancong, dokter yang menjalankan tes, informasi tentang berapa banyak tes yang dilakukan setiap hari, dan data tentang jenis pelancong seperti apa yang diperbolehkan di rumah sakit.

BRI Life

Akhir Juli (28/7) ada dugaan penjualan data dua juta nasabah BRI Life dengan harga \$7.000 atau sekitar Rp 101,6 juta. Unggahan tersebut dibagikan akun Twitter @HRock. Terdapat 463.000 dokumen yang diperjualbelikan. Kebocoran data yang terungkap dalam tangkapan layar berupa foto KTP elektronik, nomor rekening, nomor wajib pajak, akte kelahiran, dan rekam medis nasabah BRI Life.

BPJS Kesehatan

Kasus data BPJS Kesehatan bocor itu terungkap pada akhir Mei lalu (21/5). Data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon, e-mail dijual di dark web. Sebanyak 20 juta data dilengkapi foto. Data peserta BPJS Kesehatan diperkirakan merugikan negara Rp 600 triliun.

Cermati

Pada awal November 2020 lalu, sekitar 2,9 juta data pengguna platform fintech asal Indonesia, Cermati, dikabarkan diretas dan dijual secara bebas. Data tersebut kabarnya dijual melalui forum hacker bersama 34 juta data dari 17 perusahaan lain.

RedDoorz

Pendiri komunitas Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya 5,8 juta data pengguna RedDoorz yang dijual seharga 2.000 dollar AS atau sekitar Rp 28,2 juta rupiah pada November 2020 lalu.

Tokopedia

Pada awal Mei 2020, sebanyak 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data merchant Tokopedia dikabarkan dijual di situs gelap (dark web). Daftarkan email Data pengguna Tokopedia yang dijual mencakup gender, lokasi, username, nama lengkap pengguna, alamat e-mail, nomor ponsel, dan password. Data tersebut kabarnya sudah dikumpulkan peretas sejak Maret 2020. Kendati membenarkan adanya upaya pencurian, Tokopedia mengklaim bahwa informasi milik pengguna tetap aman dan terlindungi.

Bhinneka.com

Sekelompok peretas dengan nama ShinyHunters mengklaim telah menjual 1,2 juta data pelanggan Bhinneka.com. ShinyHunters kabarnya menjual 1,2 juta pengguna Bhinneka.com tersebut dengan banderol 1.200 dollar AS atau sekitar Rp 17,8 juta pada Mei 2020 lalu.

NGENES! SAAT CORONA MELANDAI, 10 PEMDA TERNYATA BELUM BAYAR INSENTIF NAKES

Jakarta- Tenaga kesehatan (Nakes) yang berada di garis terdepan penanganan Covid-19 di beberapa wilayah mengalami kondisi 'ngenes' (menyedihkan, Red). Setelah 'berperang' di tengah ledakan corona hingga berhasil dikendalikan, ternyata ada 10 pemerintah daerah (Pemda) yang belum mencairkan insentif nakes.

Hal itu terungkap ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melayangkan surat teguran tertanggal 26 Agustus 2021 kepada lima wali kota dan lima bupati. "Bapak Mendagri Tito Karnavian telah menandatangani surat teguran kepada 10 kepala daerah (bupati dan wali kota) yang belum membayarkan insentif kepada nakes di daerahnya," ucap Stafus Mendagri, Kastorius Sinaga, Selasa (31/8).

"Hari ini surat teguran Bapak Menteri bernomor 904 tertanggal 26 Agustus 2021 akan langsung dilayangkan ke 10 bupati dan wali kota yang belum membayarkan Innakesdanya," imbuhnya.

Kastorius mengurai, kebijakan refocusing APBD 2021 telah menggariskan bahwa 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) tahun anggaran /2021 ini diperuntukkan untuk penanganan COVID-19, termasuk pembayaran insentif nakes daerah.

Dalam surat teguran yang ditembuskan ke Presiden tersebut, Mendagri meminta para Kepala Daerah tersebut untuk segera membayarkan innakesda.

"Dalam hal alokasi anggaran pada APBD tidak mencukupi untuk melakukan pembayaran kekurangan

Innakesda TA 2020 dan pembayaran Innakesda TA 2021, Bupati/ Walikota dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2021 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA 2021 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan aPerubahan APBD TA 2021," ujar Tito sebagaimana dikutip dalam poin kelima surat teguran.

Bila Daerah belum melakukan refocusing anggaran sebagai sumber belanja innakesda, Kepala Daerah dapat melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan memberitahukan kepada pimpinan DPRD sehingga pembayaran Innakesda tidak terhambat. "Bahkan di beberapa daerah yang termasuk PPKM Level 4, di mana penyebaran COVID-19 masuk zona merah, insentif para nakes belum direalisasikan oleh kepala daerah," tuturnya.

Kasus Aktif 5,34% di Bawah Dunia

Di sisi lain, kesuksesan berbagai program pemerintah termasuk perjuangan nakes tampak dari makin melandainya kasus corona di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 Pusat membeberkan update mingguan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Kabar baik datang dari kasus aktif COVID-19 yang pada pekan ini sudah berada di bawah persentase kasus aktif dunia.

"Persentase kasus aktif di Indonesia yang sempat meningkat melebihi angka dunia pada bulan Juli 2021, saat ini telah menurun. Per tanggal 29 Agustus persentase kasus aktif di Indonesia yaitu 5,34%, sudah



Tenaga kesehatan di 10 daerah Indonesia ternyata belum menerima insentif hingga Mendagri memberikan teguran ke kepala daerahnya.

berada di bawah dunia yang kasus aktifnya sebesar 8,56%," kata Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (31/8).

Wiku mengatakan kasus aktif di Indonesia masih lebih rendah sekitar 4 kali lipat jika dibandingkan dengan negara-negara dengan kasus aktif tertinggi seperti Amerika Serikat dengan kasus aktif (20,63%) dan Inggris (17,72%).

Lalu apabila disandingkan dengan negara-negara di Asia seperti Jepang dengan kasus aktif 17%, Malaysia 15,4%, kasus aktif Indonesia lebih rendah 3 kali lipat. "Meskipun demikian kasus aktif di Indonesia masih

lebih tinggi 4 kali lipat dibandingkan India. India yang sempat mengalami peningkatan kasus yang signifikan saat ini berhasil menekan kasus aktif hingga 1,16%," ucapnya.

Dia menyebut penurunan persentase kasus aktif nasional ini merupakan perkembangan baik. Hal itu dapat dicapai berkat peran aktif seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah juga memastikan bahwa kapasitas testing Covid-19 di Indonesia akan terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah. Wiku mengatakan testing pada minggu ini kembali meningkat menjadi lebih dari 700 ribu orang diperiksa, dengan positivity rate yang juga turun menjadi 11,94% dari minggu sebelumnya sebesar 18,34%.

"Persentase kesembuhan di Indonesia per tanggal 29 Agustus berada pada 91,42%, lebih tinggi dibanding dunia berada pada 89,36%," ujarnya. Menurut Wiku, angka kesembuhan Indonesia pernah mencapai yang tertinggi, yaitu 92,08% pada 3 Juni 2021. Kemudian, selama lonjakan kasus pada Juli 2021, angka kesembuhannya sempat turun hingga 78,6%.

"Sayangnya persentase kematian di Indonesia masih konsisten berada di atas persentase kematian dunia sejak Juli 2020. Per tanggal 29 Agustus persentase kematian di Indonesia berada pada 3,24%, sedangkan dunia sebesar 2,08%," katanya.

Hari ini dilaporkan ada tambahan 10.534 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Sehingga total ada 4.089.801 kasus. Dari jumlah tersebut, 196.281 kasus masih positif Corona (kasus aktif). Jumlah ini lebih sedikit 6.779 dibanding kemarin.

Sementara hari ini ada 16.781 orang sembuh dari COVID-19 sehingga totalnya sebanyak 3.760.497 orang. Dan dilaporkan ada 532 pasien Corona meninggal dunia sehingga total pasien positif COVID-19 yang meninggal sebanyak 133.023 orang. (ist)

10 PEMDA YANG BELUM MEREALISASIKAN INSENTIF NAKES

1. Kota Padang belum merealisasikan anggaran Innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar **Rp 50.958.566.195**
2. Kota Bandar Lampung belum merealisasikan anggaran sebesar **Rp 11.079.600.000**
3. Kota Pontianak belum merealisasikan anggaran sebesar **Rp.19.860.000.000**
4. Kota Prabumulih belum merealisasikan anggaran Innakesda sebesar **Rp 750.000.000**
5. Kota Langsa belum menganggarkan alokasi Innakesda yang bersumber dari refocusing **8% DAU/DBH TA 2021 dalam APBD TA 2021.**
6. Kabupaten Nabire belum merealisasikan anggaran Innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar **Rp 16.212.000.000**
7. Kabupaten Madiun belum merealisasikan anggaran sebesar **Rp 16.855.313.908**
8. Kabupaten Gianyar belum merealisasikan anggaran Innakesda yang dianggarkan sebesar **Rp 26.057.294.220**
9. Kabupaten Penajam Paser Utara belum merealisasikan anggaran sebesar **Rp 20.987.474.581**
10. Kabupaten Paser belum merealisasikan anggaran Innakesda yang bersumber dari refocusing 8% DAU/DBH TA 2021 yang dianggarkan sebesar **Rp 21.939.420.000;**



Prolegnas Menengah 2020-2024

DPR TARGETKAN 246 RUU, MAMPU?

Jakarta- Dewan Perwakilan Rakyat menargetkan sebanyak 246 Rancangan Undang-undang (RUU) dalam Prolegnas Jangka Menengah tahun 2020-2024. Target tersebut merupakan hasil kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Untuk diketahui, pada tahun sidang 2020-2021 para wakil rakyat baru mengesahkan 9 RUU.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terbuka dan sistematis untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional.

"Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024, yang menargetkan 246 RUU dan 33 RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021," kata Puan dalam pidatonya di rapat paripurna Masa Persidangan I tahun Persidangan 2021-2022, Selasa (31/8).

Puan mengatakan DPR RI dan Pemerintah dituntut agar selalu cermat dan mempertimbangkan berbagai pendapat, pandangan, kondisi, situasi serta kebutuhan hukum nasional dalam melakukan pembahasan undang-undang.

Sehingga kata Puan, jangka waktu dalam pembahasan suatu undang-undang akan sangat ditentukan dengan tingkat kompleksitas dan perbedaan pandangan terkait substansi rancangan undang-undang.

"DPR RI dalam menjalankan politik legislasi tetap berpedoman pada Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara. Sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila," ujar Puan.

Selain itu, Puan mengatakan

bahwa DPR RI dalam menjalankan politik legislasi juga memperhatikan aspek dalam pembentukan undang-undang yang meliputi tujuan pembentukan, substansi yang tepat, dapat dilaksanakan, bermanfaat, dan keterbukaan. "Sehingga dapat menghasilkan produk legislasi yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan hukum nasional," ujarnya.

Adapun kinerja fungsi legislasi DPR RI pada tahun sidang 2020-2021 di antaranya telah mengesahkan 9 RUU menjadi undang-undang, 14 RUU sedang dalam tahap pembicaraan Tingkat I, dan 17 RUU sedang dalam tahap penyusunan.

Di tengah pandemi Covid-19, DPR telah menyelesaikan RUU Cipta Kerja yang merupakan omnibus law pertama di Indonesia. Harapannya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat menjadi reformasi struktural di Indonesia.

Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, terdapat 79 perkara sepanjang 2020-2021. Hanya lima perkara yang putusannya dikabulkan oleh MK. "Hal tersebut menunjukkan pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI telah sejalan dengan konstitusi negara," kata Puan.

Pertanyakan Komitmen

Terpisah, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) berharap DPR dapat memenuhi komitmennya menyelesaikan seluruh rancangan undang-undang dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Pasalnya, Formappi mengamati DPR RI tidak pernah mampu merampungkan atau mengesahkan seluruh RUU yang ditetapkan sendiri dalam prolegnas prioritas, kata Peneliti Formappi M Djadjiono.

Djadjiono saat menyampaikan Refleksi 20 Tahun Formappi pada sesi seminar virtual yang diikuti di Jakarta,



Ketua DPR RI, Puan Maharani menegaskan komitmen DPR untuk terus berbenah diri.

Senin, menerangkan kata 'prioritas' pada prolegnas prioritas merupakan target kerja DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasinya. Tercapainya target itu akan jadi salah satu penilaian publik pada kinerja DPR RI, kata dia.

"Kata prioritas saya tekankan lebih berat karena itu jadi program utama DPR dalam menjalankan fungsi legislasi. Oleh karena itu, prioritasnya disebut, tetapi hasilnya selalu tidak mencapai target yang diprioritaskan," ujar Djadjiono.

Djadjiono menyampaikan bahwa pimpinan DPR RI, termasuk pimpinan Badan Legislasi DPR RI umumnya mengakui kesulitan mengesahkan seluruh RUU pada prolegnas prioritas. Namun, Formappi menolak alasan ketidakmampuan itu, yang salah satunya disebabkan mangkirnya perwakilan pemerintah pada rapat-rapat pembahasan RUU.

"Pendapat semacam itu menurut kami salah kaprah, bahkan menyalahi amanat Undang-Undang Dasar 1945 karena Pasal 20 ayat 1 (menyebut) kewenangan membentuk undang-

undang ada pada DPR, sebaliknya pada ayat 5 ayat 1 Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR," sebut Djadjiono.

Kemudian, Undang-Undang No.2 Tahun 2018 turut mengatur DPR punya kewenangan memanggil tiap warga negara dalam rapat-rapat DPR. Pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 2/2018 menyebut DPR berhak memanggil tiap orang secara resmi lewat undangan tertulis dalam rapat-rapatnya. "Tiap orang (yang dipanggil) itu wajib memenuhi panggilan (DPR)," kata Djadjiono.

Ia menerangkan kata 'tiap orang' dalam undang-undang itu turut mencakup para menteri. "DPR punya posisi kuat memanggil menteri-menteri yang ditugasi presiden mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dan penyelesaian tiap RUU sehingga alasan tidak tercapai prolegnas prioritas karena menteri sering mangkir itu tidak bisa langsung diterima karena ada aturan-aturan yang dalam tanda kutip memaksa menteri hadir," tegas Djadjiono. (ist)

DAFTAR RUU YANG MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2021

1. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
2. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
3. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
5. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
6. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
7. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
8. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan

9. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
11. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
12. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat
13. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado
14. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat
15. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

16. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
17. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
18. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
19. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
20. RUU tentang Praktik Psikologi
21. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
22. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
23. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.
24. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
25. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
26. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
27. RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

28. RUU tentang tentang Ibukota Negara (Omnibus Law)
29. RUU tentang Hukum Acara Perdata
30. RUU tentang Wabah
31. RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan
32. RUU tentang Daerah Kepulauan
33. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA

1. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2. Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3. Daftar RUU Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

BMKG RAMAL MUSIM HUJAN MAJU, SURABAYA WASPADA DAN GEBER PERANTINGAN POHON



Petugas DKRTH sedang melakukan perantingan pohon di berbagai jalan protokol Kota Surabaya, Selasa (31/8/2021).

SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan akan datang lebih awal kali ini, mulai September hingga November. Melihat hal itu, Pemkot Surabaya melalui Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan menggeber perantingan pohon serta pengecekan dan pembersihan saluran air.

Pelaksana Tugas (Plt) DKRTH Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan, upaya ini sebagai bentuk antisipasi mencegah pohon tumbang atau terjadinya genangan. Hal ini sebagaimana instruksi dari Walikota Surabaya, Eri Cahyadi.

"Antisipasi musim hujan kita mulai ranting pohon. Teman-teman sudah mulai diminta perantingan, diminta

Bapak (walikota) juga waspada dan mengingatkan teman-teman," kata Anna saat dihubungi, Selasa (31/8).

Menurut Anna, perantingan atau perawatan pohon ini rutin dilakukan DKRTH. Namun, karena memasuki musim hujan, intensitas perantingan pohon ditingkatkan. Terutama terhadap pohon yang usianya sudah tua dan

tingginya melebihi rata-rata.

"Kalau pemeliharaan (pohon) saya pikir sama standar. Diberikan kompos pupuk dan sebagainya. Jadi setiap pohon treatmentnya beda-beda," ujarnya.

Tak hanya intensif melakukan perantingan pohon, Anna menyebut, Walikota Eri juga menginstruksikan agar jajarannya melakukan pengecekan semua saluran air. Antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan terjadinya genangan. "Pak wali juga menginstruksikan agar mengecek semua pelaluan air yang mengarah ke saluran. Saya minta tolong ke teman-teman satgas juga untuk mengecek crossing-crossing itu," kata Anna.

Pihaknya menyanggah masih kurangnya kepedulian beberapa masyarakat terhadap lingkungan.

Salah satunya masih ditemukannya sampah di saluran air. "Karena ini setiap tahun begini. Anak-anak (satgas) berada di bawah saluran dan airnya mengalir itu masih saja menemukan kulit pisang, bungkus rokok, ini luar biasa," pungkasnya.

Dimulai dari Sumatera

Sebelumnya, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, dari total 342 Zona Musim (ZOM) di Indonesia akan memasuki musim hujan secara berturut-turut, sejak bulan September, Oktober dan November 2021 mendatang. "Sebanyak 14,6 persen diprediksi akan mengawali musim hujan pada September 2021," katanya.

Adapun, wilayah yang akan mengawali musim hujan pada September mendatang adalah Sumatera bagian tengah dan sebagian Kalimantan. Sementara itu, ada sekitar 39,1 persen wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada Oktober 2021 mendatang.

"Jika dibandingkan terhadap rerata klimatologis awal musim hujan pada periode 1981-2010, maka awal musim hujan 2021/2022 di Indonesia diprakirakan maju pada 157 zom (45,9 persen), sama pada 132 zom (38,6 persen), dan mundur pada 53 zom (15,5 persen)," jelas Dwikorita.

Dwikorita menambahkan, secara umum, sifat hujan selama musim hujan 2021/2022 diprakirakan normal atau sama dengan rerata klimatologisnya pada 244 zom (71,4 persen). Namun,

sejumlah 88 zom atau sekitar 25,7 persen wilayah akan mengalami kondisi musim hujan atas normal atau lebih basah dari biasanya. Sedangkan, sekitar 10 zom atau 2,9 persen akan mengalami musim hujan bawah normal.

Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim Dodo Gunawan mengingatkan agar masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejadian cuaca ekstrem yang bisa terjadi di masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan saat ini. Seperti hujan es, hujan lebat disertai kilat dan petir, dan angin puting beliung jelang masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan.

Sebab, tidak hanya bencana, perubahan cuaca yang tidak menentu bisa membuat imunitas seseorang melemah sehingga menjadi rentan terkena penyakit. (ard,ist)

RAMALAN BMKG TERKAIT MUSIM HUJAN 2021

MULAI HUJAN SEPTEMBER	MULAI HUJAN NOVEMBER
- Sumatera bagian selatan	- Sebagian Lampung
- Sebagian besar Kalimantan	- Jawa
- Sulawesi	- Bali
- Jawa	- Nusa Tenggara
- Bali	- Sulawesi

PG RMI DIDUGA LANGGAR ANDALALIN, PEMKAB BLITAR SIAP LAPOR KE PEMPROV-KEMENTERIAN

BLITAR - Diduga melakukan pelanggaran Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akan melaporkan Fabrik Gula PT Rejoso Manis Indo (PG RMI) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Tak hanya itu laporan juga akan dibawa ke pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian BUMN.

"Kami sudah menerima laporan adanya aksi warga memblokir truk pengangkut tebu tersebut, dari petugas Dishub Pemkab Blitar," ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Setda Pemkab Blitar, Tuti Komariyati, Selasa (31/8).

Langkah ini juga diambil sebagai respon aksi warga Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, memblokir ratusan truk pengangkut tebu PG RMI pada Minggu (29/8/2021) hingga Senin (30/8/2021) kemarin.

Tuti menjelaskan sebenarnya pihak Pemkab Blitar jauh sebelum dimulainya musim giling, sudah

mengingatkan PG RMI. "Kami ajak komunikasi secara intensif, mengambil langkah cepat dan koordinasi dengan Polres Blitar. Agar kejadian kemacetan hingga mengganggu lalu lintas, tidak terulang lagi seperti tahun sebelumnya," jelasnya.

Namun justru pihak PG RMI tidak patuh terhadap Andalalin yang dibuat sendiri, dan justru melanggar sendiri. Oleh karena itu Tuti mengungkapkan Pemkab Blitar akan bertindak tegas, dengan melaporkan dugaan pelanggaran Andalalin ini ke Provinsi Jatim dan 3 kementerian yaitu Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian BUMN. "Kan sudah terbukti pihak pabrik (PG RMI) yang melanggar aturan. Apa adanya saja kami sampaikan ke provinsi dan pusat, sudah saya laporkan pada pimpinan (Bupati Blitar) karena beliau yang nanti tandatangan," ungkapnya.

Andalalin merupakan kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau usaha tertentu, yang dituangkan dalam bentuk

dokumen. Adapun dugaan pelanggaran Andalalin PG RMI, yaitu menyediakan lahan parkir truk pengangkut tebu. Agar tidak terjadi antrean truk yang parkir di tepi jalan, yang mengganggu arus lalu lintas maupun aktifitas warga sekitar.

Pada musim giling tahun 2021 yang dimulai Juni lalu, lahan parkir truk pengangkut tebu memang tidak tersedia seperti yang tercantum pada Andalalin. Jika pada musim giling tahun 2020 lalu, PG RMI menggunakan lahan Perhutani KPH Blitar untuk lokasi parkir truk pengangkut tebu menunggu antrian masuk area pabrik

Penggunaan lahan di Alur C RPH Jajagan Desa Siraman seluas sekitar 5.500 m² ini, mampu menampung ribuan truk pengangkut tebu. Namun untuk musim giling tahun ini, lokasi tersebut ditutup dan tampak tulisan "Truk Tebu Dilarang Parkir di Area Alur Perhutani Sebelum Perizinan Tuntas".



Papan penutupan lokasi lahan Perhutani di Alur C RPH Jajagan Desa Siraman, yang tahun lalu digunakan parkir truk pengangkut tebu PG RMI

Pihak Perum Perhutani KPH Blitar ketika dikonfirmasi mengatakan PG RMI memang sudah mengajukan surat kerjasama penggunaan lahan Alur C di RPH Jajagan tersebut sebelum musim giling. "Saat ini masih berproses di pusat, Perhutani Jatim juga sudah cek ke lokasi. Selama pusat belum ada keputusan, kami menutup lokasi dan memasang pengumuman di lokasi," kata Kepala KPH Blitar, Teguh Jati Waluyo. (ais)

OTT Bupati Probolinggo

KINI JABATAN 252 KADES KOSONG, KPK UNGKAP MAHAR RP 20 JUTA/ORANG

Surabaya – KPK telah menetapkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya yang merupakan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Hasan Aminuddin sebagai tersangka korupsi. Terungkap ada praktik jual beli jabatan dalam pengisian pejabat kepala desa (kades) di Probolinggo. Mereka yang menginginkan posisi tersebut harus membayar mahar Rp 20 juta dan juga upeti penyewaan tanah desa Rp 5 juta per hektar.

Kini, jabatan Tantri, sapaan akrabnya digantikan wakilnya Timbul Prihanjoko yang menjadi Plt Bupati Probolinggo. Usai menerima SK dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Timbul mengakui ada kekosongan jabatan kepala desa. Dia menyebut ada 252 jabatan yang kosong. Timbul pun menegaskan akan segera mengisi kekosongan ini.

"Yang kosong ada 252. Akan diisi dalam waktu dekat. Harus itu. Berpacu untuk itu," kata Timbul di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/8).

Timbul menambahkan jabatan 252 kepala desa ini tersebar di 24 kecamatan di Probolinggo. Namun, dirinya tidak hafal kecamatan mana-mana saja yang kosong. "Kecamatan ada 24. Saya nggak hapal yang kosong. Tapi rata-rata semua," imbuhnya.

Saat disinggung bagaimana mekanisme pengisian jabatan kades

ini, Timbul menyebut pihaknya akan melantik Pj (Penjabat Sementara) untuk mengisi kekosongan ini. "Itu ada mekanismenya. Jadi itu artinya sebelum pilkades, pengisian yang lowong ini ada namanya Pj. (Mekanisme pengisian) Itu pengajuannya dari camat ke bupati. Bupati yang nganukan (Menyetujui)," papar Timbul.

Sebelumnya, Timbul menyebut Gubernur Khofifah Indar Parawansa berpesanan padanya untuk berlari kencang. Timbul mengatakan dirinya juga berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Tentunya kita laksanakan tugas dan fungsi. Saya sampaikan ke pak sekda dan jajaran untuk menjalankan tugas di pemerintahan ini dan melayani masyarakat," ungkap Timbul. (Pesan gubernur) Kami harus lari kencang karena ada beberapa agenda yang harus kami tuntaskan. Untuk agenda selanjutnya ini saya harus konsolidasi dulu dan koordinasi dengan teman-teman," pungkasnya.

Peran Penting Hasan

Dalam konferensi pers di KPK pada Selasa (31/8) dini hari, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memaparkan tentang kronologi OTT serta konstruksi perkara tersebut. Alexander menyebutkan, pada Jumat, 27 Agustus 2021, ada 12 pejabat kades menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan,

Probolinggo, di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada Puput melalui Hasan dengan perantara Doddy Kurniawan. "Dari yang hadir ini telah disepakati bahwa untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 20 juta sehingga terkumpul sejumlah Rp 240 juta," ucap Alexander.

Lalu pada Minggu, 29 Agustus 2021, KPK menangkap Doddy Kurniawan dan Sumarto, yang tengah membawa uang Rp 240 juta serta Muhammad Ridwan, yang juga membawa uang Rp 112.500.000. Rupanya Doddy dan Sumarto telah membuat proposal usulan sejumlah nama untuk menjadi kades di Kabupaten Probolinggo. Uang-uang itu sedianya akan diserahkan ke Hasan selaku suami dan juga orang kepercayaan Puput. Hasan disebut Alexander menggunakan tanda tangannya untuk sebagai tanda bukti persetujuan atas nama Puput.

"Hasan Aminuddin yang merupakan suami sekaligus orang kepercayaan dari PTS (Puput Tantriana Sari) melakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS," ucap Alexander. (ist)

Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa menyerahkan SK sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Probolinggo kepada Wakil Bupati Timbul Prihanjoko di Grahadi, Selasa (31/8/2021) setelah Bupati Puput resmi menjadi tersangka korupsi.



22 TERSANGKA KASUS JUAL BELI JABATAN KADES KAB. PROBLINGGO

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| Pemberi suap: | : |
| - Sumarto (ASN) | - Ahkmad Saifullah (ASN) |
| - Ali Wafa (ASN) | - Jaelani (ASN) |
| - Mawardi (ASN) | - Uhar (ASN) |
| - Mashudi (ASN) | - Nurul Hadi (ASN) |
| - Maliha (ASN) | - Nuruh Huda (ASN) |
| - Mohammad Bambang (ASN) | - Hasan (ASN) |
| - Masruhen (ASN) | - Sahir (ASN) |
| - Abdul Wafi (ASN) | - Sugito (ASN) |
| - Kho'im (ASN) | - Samsuddin (ASN) |

- Penerima Suap:**
- Puput Tantriana Sari (Bupati Probolinggo)
 - Hasan Aminuddin (Anggota DPR RI)
 - Doddy Kurniawan (Camat Krejengan)
 - Muhammad Ridwan (Camat Paiton)

SUDAH VAKSIN LENGKAP, CALON PENUMPANG PESAWAT JAWA-BALI TAK PERLU TES PCR

Jakarta-Pemerintah kembali melakukan penyesuaian aturan perjalanan jarak jauh dalam penerapan masa PPKM di Jawa dan Bali yang telah diperpanjang sampai 6 September 2021.

Dalam aturan yang dituangkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 38 tahun 2021 terkait PPKM Level 4, 3, dan 2 di Jawa dan Bali, tertulis bahwa masyarakat yang hendak bepergian menggunakan moda transportasi udara [pesawat udara] tak perlu lagi menunjukkan bukti negatif tes swab PCR.

Calon penumpang diminta membawa sertifikat vaksin 2 dosis dan juga hasil negatif swab antigen yang berlaku H-1. Namun aturan tersebut hanya berlaku bagi perjalanan dengan pesawat udara antardaerah di Jawa dan Bali saja.

Kewajiban menyertakan hasil tes PCR juga masih diperlukan khusus



Petugas bersiaga melakukan cek persyaratan calon penumpang pesawat udara untuk meminimalisir risiko penularan corona.

bagi calon penumpang yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama saja. Ketentuannya, hasil PCR negatif H-2 penerbangan.

Melihat berbagai pelanggaran tersebut, sejumlah mesin penggerak roda

perekonomian mulai 'panas' kembali. Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keoptimistisannya memandang Perekonomian Indonesia ke depan.

"Tahun ini kita berharap seluruh elemen agregat demand sudah mulai masuk ke zona positif. Dengan demikian APBN tidak bekerja sendiri," kata Sri Mulyani dalam acara Seminar Nasional ISEI Tahun 2021, yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (31/8).

Momen pemulihan ini, kata dia, dimulai sejak kuartal II 2021 saat pertumbuhan ekonomi kembali masuk zona positif pada level 7,07 persen secara year on year, hampir semua indikator telah menunjukkan perbaikan semisal kinerja

investasi, ekspor, impor begitu juga dengan konsumsi masyarakat.

Sehingga, dia berharap seluruh mesin pertumbuhan ekonomi masih ke zona positif. Dengan begitu, belanja negara tidak lagi menjadi andalan. "Inilah yang disebut sebagai langkah dan pola pemulihan ekonomi di mana mesin pertumbuhan akan mulai merata dalam permintaan yang tidak hanya bergantung pada APBN dan fiscal policy," katanya.

Tak hanya itu, salah satu indikator ekonomi yang mulai membaik kata dia adalah dari sisi demand yang terlihat dari data Purchasing Managers' Index (PMI) Indonesia yang masih ekspansif di level 53,5 pada Juni 2021. "Ini artinya, seluruh negara mulai bergerak perekonomiannya, yang akan menimbulkan demand untuk ekspor kita dan tentu arus modal untuk investasi," ucapnya. Namun demikian, ia mengatakan akan tetap mewaspadaai penyebaran Covid-19. (ist)

IMPRESSION

LESTI KEJORA

*Jadi Crazy Rich Di Usia 21 Tahun,
Duitnya dari Mana Saja?*

Sukses di usia muda bisa jadi dambaan semua orang. Lesti Kejora merupakan salah satu yang mengalami hal tersebut. Dari mana saja sumber uangnya ya?

Penyanyi dangdut berusia 21 tahun itu sudah mendapatkan kekayaan melimpah atas hasil kerja kerasnya di dunia hiburan. Bahkan harta kekayaan wanita kelahiran 5 Agustus 1999 itu sudah bisa dipakai untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Ia mampu menafkahi keluarganya meski masih belia.

Saat ini Lesti Kejora telah memiliki rumah mewah dua lantai. Rumah tersebut jauh berbeda dari tempat tinggalnya dulu ketika masih berada di Cianjur, Jawa Barat. Sejak usia empat tahun, Lesti Kejora sudah belajar menyanyikan lagu-lagu tradisional Sunda. Ia pun mencoba peruntungannya dengan pergi ke Ibukota di usia 14 tahun.

Lesti pergi merantau untuk mengikuti audisi D'Academy, ajang pencarian bakat dangdut. Tak disangka, ia berhasil membawa pulang piala juara 1 di panggung final. Sejak saat itu, ia mendapatkan berbagai tawaran pekerjaan.

MENYANYI

Lesti Kejora sudah terbiasa menggeluti bidang tarik suara sejak masih kecil. Ia bahkan sudah menyanyi dangdut dari panggung ke panggung ketika kelas 2 SD. Menjadi juara ajang dangdut Tanah Air, kemampuannya di bidang tarik suara tak perlu diragukan. Banyak orang meminta Lesti Kejora untuk mengisi panggung acara hiburan dengan suara merdunya.

Di sesi Instagram Live bersama Inul Daratista, Lesti pernah bercerita mengenai honor menyanyi yang terus meningkat setiap manggung. "Kalau dulu masih menyanyi, Dede dari enggak dikasih uang yang sampai akhirnya dari Rp 10 ribu naik lagi Rp 50 ribu terus naik, naik, dan naik. Setiap tahun berproses," ungkap Lesti. Semakin eksis, honor Lesti Kejora sempat menyentuh angka ratusan juta. "Pokoknya paling tinggi sampai Rp 100 juta. Alhamdulillah pernah merasakan dikasih honor segitu," ujar Lesti Kejora.

ENDORSE

Tak hanya mengandalkan suara, Lesti Kejora juga memanfaatkan media sosial untuk mengisi pundi-pundi rupiah. Saat ini Lesti memiliki akun Instagram dengan 21,8 juta followers. Manajer Lesti mengungkapkan tarif endorsement Lesti kini mencapai Rp 50 juta, Bunda. Tarifnya terbaagi ke dalam tiga jenis promosi. "Untuk Lesti Instagram Story Rp 40 juta, foto Rp 50 juta, video Rp 60 juta," tulis pihak Lesti.

JADI JURI

Berbakat di bidang tarik suara membuat Lesti Kejora dipercaya untuk menilai para kontestan. Ia didapuk menjadi juri di ajang pencarian bakat dangdut. Hal itu membuat Lesti wajib hadir di acara tersebut hampir setiap hari. Ia pun mendapatkan bayaran ekstra dengan tampil di layar kaca sebagai juri.

YOUTUBE

Media sosial kini menjadi salah satu

sarana mencari uang. Terutama seperti Lesti Kejora yang telah memiliki nama dan reputasi di masyarakat. Lesti Kejora menjalankan akun YouTube yang diberi nama LESTI CHANNEL untuk mengunggah berbagai vlog. Ia kerap menampilkan sekilas momen kesehariannya di vlog tersebut. Kanal YouTube Lesti kini sudah memiliki 4,9 juta subscribers loh. Views yang didapatkan oleh Lesti juga mencapai ratusan ribu hingga jutaan. Enggak heran kalau kekayaannya terus mengalir nih.

BERBISNIS

Sukses di dunia hiburan tak membuat Lesti Kejora berdiam diri. Ia juga merintis sebuah bisnis di bidang kecantikan dan mode, Bunda. Lesti Kejora memiliki brand kecantikan bernama Purnama Beauty yang menjual berbagai kosmetik dan produk perawatan kulit halal. Tak hanya itu, ia juga menjual berbagai jenis busana muslimah.

Brand fashion muslim Lesti diberi nama Lesti Daily. Ia tak hanya menjual aneka modest wear, melainkan juga hijab santun kekinian. (ist)

BILLAR IZINKAN LESTI TETAP BEKERJA

Rizky Billar saat ini telah berstatus menjadi suami Lesti Kejora. Status ini mewajibkan Rizky Billar untuk membimbing dan bertanggung jawab atas kehidupan Lesti Kejora. Sebagai suami, Rizky Billar juga berhak menentukan bagaimana jalan hidup Lesti Kejora setelah sah jadi istrinya.

Termasuk soal karier Lesti Kejora di dunia entertainment. Sebelum keduanya resmi menikah pada Kamis (16/8/2021), Rizky Billar mengaku sudah mendapatkan pertanyaan soal ini dari Lesti Kejora. Saat itu, Lesti bahkan menyinggung keinginannya untuk menjadi ibu rumah tangga.

"Sebelumnya, sebelum Dede nanya, Dede udah izin ke saya, 'Kakak boleh nggak Dede bekerja sebagai ibu rumah tangga aja gitu?'" kata Rizky Billar.

Tapi, di sisi lain Lesti Kejora juga menanyakan tentang perizinan menjadi wanita karier pada Ustaz Maulana. "Sekarang kan Dede udah punya suami, mau minta izin kerja itu gimana?" tanya Lesti. Ustaz Maulana menjawab, seorang istri boleh bekerja jika sang suami memberikan izin. Ustaz Maulana menekankan bahwa perizinan istri bekerja setelah menikah tidak boleh lepas dari dua prinsip yaitu ridho suami dan tidak membahayakan.

"Sebaiknya wanita itu berada di rumah karena yang bertanggung jawab adalah suami, kerja? jawabannya boleh-boleh aja," kata Ustaz Maulana. "Sepanjang, satu ada restu ada ridho dari suami. Semua dari ujung kepala sampai kaki tanggung jawab Rizky, kedua tidak membahayakan pada dirinya dan tidak melanggar syariat," tutur Ustaz Maulana.

Sementara itu, Rizky Billar sendiri selaku suami Lesti Kejora mengatakan akan tetap memberikan izin bekerja pada sang istri. Dengan syarat, Lesti tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri dan seorang ibu kelak. Baca juga: Tukul Arwana Ungkap Sikap Rizky Billar dan Lesti Kejora Saat Pertama Bertemu "Yang penting nggak melupakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga," kata dia.

Sumber Pendapatan

Rizky Billar memiliki pundi-pundi kekayaan di luar pekerjaannya sebagai pemain FTV dan sinetron. Banyak yang belum tahu jika Rizky Billar diam-diam memiliki usaha jual beli berlian. Ia memiliki toko berlian bernama MRB Jewelry, singkatan dari namanya, Muhammad Rizky Billar. Bisnis yang dijalani bersama keluarga khusus menjual berbagai macam jenis berlian hingga pemesanan cincin untuk pernikahan.

Billar juga kini merambah bisnis kuliner. Kali ini, Billar bekerja sama Basuki Surodjo, yang dikenal sebagai raja IT dan Christopher Sebastian, bos MAKKO Group. Mereka menjalankan bisnis daging sei sapi dengan brand Raja Sei yang mengusung tagline rasanya anjay, kata yang sering diucapkan Rizky.

Rizky Billar aktif di media sosial dengan jumlah follower yang sangat banyak. Sekali unggahan endorse dari Billar dihargai US\$9.294 - US\$15.490 atau setara dengan (Rp 139 juta - Rp 231 juta). Untuk pendapatannya dari channel Youtube miliknya, perkiraan pendapatan Rizky Billar per bulan sekitar US\$10.300 - US\$164.800 atau setara dengan Rp 154 juta - Rp 2,5 miliar seperti dilansir dari Social Blade. (ist)



JAJAL TANAM CABAI RAWIT DI POLYBAG YUK!

Cabai rawit merupakan salah satu tanaman yang paling mudah dirawat di mana saja dan tumbuh cepat. Selain itu, kebutuhan masyarakat Indonesia akan stok cabai rawit yang terus meningkat menjadikannya sebagai salah satu tanaman cabai paling menguntungkan.

Tak heran, budi daya cabai rawit menjadi salah satu pilihan dari sekian banyak jenis sayuran. Jika tertarik menanam cabai rawit, tapi tak

memiliki lahan yang luas, kamu bisa menyiasati menggunakan polybag. Nantinya, polybag ini bisa kamu letakkan di pekarang rumah maupun di sudut-sudut halaman rumah. Bahkan, kamu juga bisa membudidayakan tanaman cabai organik di polybag serta tentunya lebih sehat dikonsumsi. Melansir dari kanal YouTube Tanaman Rumah, berikut ini cara menanam cabai rawit di polybag.

Persiapan bibit

Tahap pertama yang dilakukan sebelum menanam cabai rawit organik di polybag ialah mempersiapkan bibit tanaman cabai rawit dengan penyemaian biji atau benih. Biji cabai rawit bisa didapatkan dari cabai rawit yang sudah tua dan matang. Cara mendapatkan biji cabai rawit terbaik:

- Keluarkan biji cabai rawit yang sudah matang, lalu pisahkan daging dan bijinya. Rendam biji pada air dan buang biji yang mengapung.
- Gunakan biji yang tenggelam sebagai bibit.
- Tiriskan biji cabai yang sudah direndam air dan jemur di bawah sinar matahari hingga kering.
- Kini, biji cabai rawit sudah bisa digunakan untuk penyemaian.

Cara menyemai biji cabai rawit

Setelah memperoleh biji cabai rawit yang telah dikeringkan, langkah

selanjutnya menyemai biji cabai rawit. Berikut ini langkah menyemai biji cabai rawit:

Persiapkan media semai, yakni campuran tanah humus yang telah digemburkan dengan pupuk kandang menggunakan perbandingan 1:1, kemudian aduk hingga tercampur rata. Masukkan media semai ke botol plastik, lalu taburkan biji cabai yang sudah dikeringkan secara merata dengan memberikan jarak dan jangan terlalu padat.

Tutup biji cabai dengan media tanah dan pastikan semua bagian tertutup tanah. Kemudian, siram dengan air sedikit demi sedikit dan hati-hati. Tutup persemaian dengan plastik gelap, lalu letakkan di tempat teduh. Diharapkan tunas akan muncul setelah tiga sampai lima hari persemaian. Untuk perawatan, cukup siram biji cabai dengan air setiap hari dan tidak perlu menggunakan pupuk.

Proses penanaman ke polybag

Setelah tunas cabai rawit tumbuh



dan berusia dua minggu, kini saatnya memindahkan tunas ke media tanam yang lebih besar, yakni polybag. Berikut proses atau cara menanam cabai rawit di polybag: Siapkan media tanam dengan campuran tanah dan pupuk kandang menggunakan perbandingan 1:1, lalu tambahkan kompos daun dan arang kayu yang sudah dihaluskan.

Campur semua bahan hingga merata. Kemudian, masukkan ke polybag berukuran 40x50 sentimeter dan tanam bibit cabai. Cabut bibit cabai rawit perlahan agar tidak merusak akar. Sebelum pemindahan media tanam, siram dulu bibit agar mudah dicabut. Selanjutnya, masukkan bibit ke polybag.

Perawatan tanaman

Setelah dipindahkan ke polybag, langkah berikutnya merawat tanaman cabai rawit agar cepat berbuah dan panen. Nah, berikut ini langkah-langkah merawat tanaman cabai rawit

Penyiraman Lakukan penyiraman setiap pagi atau sore hari agar kebutuhan airnya tercukupi.

Untuk mencegah hama atau jamur pada tanaman cabai rawit, kamu bisa menggunakan pestisida organik dengan campuran bawang putih atau limbah puntung rokok. Selain mencegah hama, cara ini juga berfungsi mempertahankan kesuburan daun. Dosis yang digunakan adalah 50 mililiter pestisida untuk dua liter air.

Kamu bisa menggunakan micin untuk pemupukan tanaman cabai organik. Dosis yang digunakan ialah satu sendok makan micin untuk dua liter air. Aplikasikan pupuk ini pada seluruh bagian tanaman setiap lima hingga tujuh hari sekali hingga tanaman berbuah. Jika sudah berbuah, berikan satu sendok makan micin untuk dua liter air dengan takaran 250 mililiter per polybag setiap lima sampai tujuh hari sekali. (ist)

INGAT YA! MEMAINKAN PONSEL SEBELUM TIDUR BERDAMPAK BURUK

Kamu mungkin tidak menyadari bagaimana kebiasaan memainkan ponsel sebelum tidur serta menaruhnya di bawah bantal dapat memengaruhi tidur dan kesehatan otak. Apa yang mungkin tampak seperti kebiasaan yang tidak berbahaya, sebenarnya dapat berdampak besar pada kesehatan kamu secara keseluruhan lho.

Dilansir dari Cleveland Clinic, berikut beberapa bahaya memainkan ponsel sebelum tidur, menurut penuturan spesialis gangguan tidur, Dr. Harneet Walia.

PIKIRAN TERLIBAT SECARA PSIKOLOGIS

Ketika tiba waktu untuk pergi tidur, biasanya hal terakhir yang kita lakukan adalah mencari banyak informasi ataupun hiburan dari ponsel. Apalagi, jika kamu merasa harus selalu terhubung dan tersedia. Dr. Walia memperingatkan bahwa gagasan ini telah memaksa tubuh tidak pernah benar-benar beristirahat, bahkan ketika sedang tidur.

“Memeriksa ponsel merangsang otak sehingga kita lebih aktif dan terjaga,” katanya. “Bahkan hanya pemeriksaan cepat saja akan melibatkan otak Anda dan memperlama waktu tidur yang seharusnya.”

CAHAYA BIRU DARI PONSEL MENEKAN MELATONIN

Cahaya biru yang dipancarkan layar ponsel tidak hanya buruk bagi penglihatan, tetapi juga buruk bagi otak kamu. Melatonin yang bertanggung jawab mengendalikan siklus tidur-bangun tubuh akan terganggu akibat cahaya biru ponsel. Hal ini mengakibatkan, kamu bisa mengalami insomnia, kelelahan di siang hari dan cepat marah.

Paparan cahaya biru juga dapat memengaruhi jam tubuh internal kamu dengan membuang ritme sirkadian, yang selaras dengan membedakan kondisi terang dan

Foto: <https://www.pexels.com/>



gelap. Itulah mengapa kamu merasa lebih lelah di malam hari saat matahari mulai terbenam dan mengapa kamu merasa lebih berenergi di pagi hari saat matahari terbit. Jika terganggu, tubuh akan kebingungan membedakan waktu.

DAPAT MENUNDA TIDUR REM

Dr. Walia mengatakan, jika kamu memeriksa ponsel sebelum tidur dapat menyebabkan gangguan emosi, pikiran, dan kecemasan, yang dapat mengakibatkan gangguan tidur rapid eye movement (REM). REM sendiri merupakan fase akhir dalam tidur alias tidur bermimpi. Mimpi terjadi karena respons akibat menatap layar ponsel dapat membuat kamu merasa terjaga sehingga terdapat peningkatan aktivitas pada otak.

MEMICU TERJADINYA KEBAKARAN

Beberapa orang begitu terikat pada ponsel mereka sampai-sampai menyimpannya di bawah bantal. Hasil dari kebiasaan ini telah menyebabkan insiden bantal terbakar, seperti yang terjadi pada seorang remaja di Texas, Amerika Serikat pada tahun 2014. Ia terbangun karena bau terbakar yang ditemukan berasal dari ponsel panasnya yang terdapat di bawah bantalnya.

Dan pada tahun 2016, Departemen Kepolisian New York Amerika Serikat (NYPD) bahkan meminta warganya untuk tidak meninggalkan ponsel mereka di bawah bantal di malam hari setelah mendapati kasus ponsel warganya yang menimbulkan panas berlebih saat ditinggal tidur.

JADI APA YANG HARUS DILAKUKAN?

Jika kamu pengguna teknologi di malam hari, penting untuk menetapkan beberapa aturan dasar untuk penggunaan yang lebih dekat dengan waktu tidur.

Dr. Walia merekomendasikan untuk memotong waktu menatap layar ponsel 30 menit hingga 1 jam sebelum waktu tidur. Hal ini bukan saja berlaku pada ponsel, tetapi juga pada gawai lain seperti TV dan tablet yang dapat memancarkan cahaya biru.

Kamu juga bisa menjauhkan ponsel setidaknya 3 kaki dari tempat tidur kamu untuk membatasi diri serta mematikan ponsel sebelum tidur, ataupun menghidupkannya dengan mode airplane.(ist)

LISTSTYLE

AGAR TAMPILAN MONOKROMMU TIDAK MEMBOSANKAN

Pada dasarnya monokrom ini merupakan konsep warna, yang artinya 'hanya satu warna'. Namun dalam dunia fesyen, monokrom dikenal dengan konsep warna hitam dan putih. Iya. Monokrom adalah bentuk kompromi yang sempurna, antara si hitam dan si putih.

Seperti pernah dimuat dalam Vogue, tren monokrom adalah tren permainan dekoratif untuk memberikan nuansa pada warna hitam dan putih nan segar. Bermain pola, merinci teknik pembuatan, pola geometrik dan desain-desain cerdas lainnya menjadi ciri khas dari permainan gaya monokrom ini.

Mereka yang biasanya selalu menghindari dari busana bercorak penuh mungkin menemukan bahwa kesederhanaan grafis dari hitam dan putih pada konsep monokrom ini terlihat agak lebih menakutkan. Lurus dan sempit dengan pola linear adalah cara aman untuk pendekatan gaya monokrom. Atau bisa juga dengan busana bergaya Breton – sebuah tren fesyen dengan pola blok khas garis-garis yang dulu sering digunakan pelaut Prancis – yang simpel bisa jadi cara paling aman.

Tren monokrom dalam fesyen ini dimulai sejak 1960-an yang dikenal dengan era monocrazy. Ini adalah dekade revolusi fesyen. Sebuah dekade untuk para kaum 'mods' yang tampil berani, tajam, dan minimalis. Era 'Op Art', sebuah seni abstrak, hitam dan putih dari ilusi optik.

Di era ini terjadi lonjakan motif geometrik, papan catur, dan strip, yang

pada gilirannya mengubah pandangan tradisional kaum perempuan. The Bubble menuliskan, dengan warna hitam dan putih yang berkembang di industri fesyen perempuan, maka kecanggihan busana laki-laki pun berpindah ke perempuan. Monokrom memberikan otoritas tersendiri bagi perempuan, juga memberikan kesempatan untuk beristirahat dari apa yang dinamakan 'batas-batas'.

Monokrom telah mempertahankan posisi yang signifikan dalam industri fesyen selama puluhan tahun. Bahkan hingga kini. Mewabah kemana-mana, ke seluruh penjuru dunia.

Monokrom dapat dipakai untuk berbagai keperluan. Apakah itu dengan gaun hitam polos yang dipadu dengan kalung mutiara, atau celana panjang hitam dengan blus putih dan blazer hitam. Paduan-paduan itu akan semakin cantik jika dikombinasikan dengan sentuhan lipstik berwarna pastel. Classic Chic, mungkin. Nah, untuk tampilan yang lebih kasual, cobalah jumper atau overall berbahan jeans hitam dengan kemeja berwarna putih.

Selain itu, monokrom pun rupanya bisa jadi alternatif bagi para perempuan karir. Ada sedikit beberapa percobaan konsep monokrom dalam busana kerja sehari-hari. Dikutip dari The Telegraph, satu hal yang harus diingat dari konsep monokrom: kontras. Karena hitam dan putih adalah kombinasi yang sangat 'menonjol' dan berani. Ensemble monokrom pada akhirnya akan terlihat pintar dengan dua warna yang berada di ujung spektrum. Eye-catchy!

Foto: foto : <http://itemushon.blogspot.com/>



TIPS SEDERHANA TAMPII BEDA



DETAIL

Salah jenis detail pakaian yang bisa kamu pertimbangkan untuk memperbarui tampilan monokrom mu semakin stylish adalah fringe. Bisa melalui sweater atau jaket agar memberi statement pada tampilanmu.



PERHIASAN

Coba tambahkan kalung atau anting perak dalam desain yang unik untuk membuat tampilan monokrom kamu se-

makin stylish. Hindari terlalu memakainya secara ramai. Maksimal dua jenis saja.



METALLIC

Berikan elemen kejutan lewat pilihan sepatu dalam nuansa metallic seperti emas atau perak. Ketika mencoba trik ini sebaiknya jangan gunakan aksesoris seperti perhiasan.

CELANA KULOT

Tinggalkan sejenak celana panjang



favoritmu. Model celana yang sedang menjadi tren belakang ini adalah kulot. Kamu bisa memakainya bersama sneakers atau boots tinggi untuk tampilan yang edgy.



NUANSA SPORTY

Kenakan sesuatu yang bernuansa sporty seperti bomber jacket dengan pilihan busana yang kontras semisal dengan rok. Tambahkan aksesoris seperti belt

Penyuka gaya monokrom tak perlu sampai merasa kehabisan ide karena terdapat sejumlah cara yang bisa kamu gunakan untuk memperbarui penampilan. Opsi tampilan gaya monokrom tidak hanya sebatas warna hitam, putih dan abu-abu.

Sesekali mengapa tidak untuk menyisipkan warna lain agar memberi elemen kejutan pada penampilanmu. Selain itu jangan ragu untuk bermain dengan detail. Berikut 5 cara agar tampilan monokrom mu tidak membosankan.



KARUT MARUT PERLINDUNGAN ...*(dari hal 1)*

Kebocoran data pribadi warga tampaknya masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Buktinya, lagi-lagi kasus serupa terjadi. Terbaru, malah data milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lah yang 'dicuri'.

Dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna eHAC dilaporkan pertama kali oleh siber vpnMentor. Dugaan kebocoran data eHAC terkait dengan ID pengguna yang berisi nomor kartu tanda penduduk (KTP), paspor serta data dan hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon dan nomor peserta rumah sakit, nama lengkap, tanggal lahir, pekerjaan dan foto.

Tim peneliti menyebutkan aplikasi tersebut tidak memiliki privasi dan protokol keamanan data yang baik. Aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit Kemenkes itu digunakan untuk mereka yang hendak bepergian di dalam negeri. Penggunaanya warga negara Indonesia dan juga asing.

Kedua peneliti itu menemukan basis data eHAC terbuka dan langsung menghubungi Kementerian Kesehatan setelah pastikan keaslian data tersebut.

Karena Kementerian Kesehatan tidak membalas laporan tersebut, tim peneliti juga mengontak Tim Tanggap Darurat Komputer serta Google yang menjadi host eHAC. Sayangnya hingga awal Agustus tidak ada balasan dari Kementerian dan Lembaga terkait. Tim peneliti juga berusaha menghubungi beberapa lembaga lain termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kami menghubungi mereka pada 22 Agustus dan mereka membalas di hari yang sama. Dua hari kemudian, pada 24 Agustus, peladen itu dinonaktifkan," kata pernyataan vpnMentor. Mereka menyebutkan

pengembang aplikasi menggunakan 'database Elasticsearch' tanpa jaminan untuk menyimpan 1,4 juta data dari sekitar 1,3 juta pengguna.

Menanggapi hal ini, Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI dr Anas Ma'ruf MKM mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut. Disebutkan, dugaan kebocoran data ini terjadi di mitra dan telah diketahui oleh pemerintah.

Ia mengatakan kebocoran data terjadi di aplikasi eHAC yang lama dan kini sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021. Semua pelaku perjalanan kini mengisi eHAC lewat aplikasi PeduliLindungi. "Sebagai langkah mitigasi, eHAC lama sudah dinonaktifkan dan saat ini eHAC berada dalam PeduliLindungi," ujar Anas dalam konferensi pers Kemenkes RI Selasa (31/8).

Anas menegaskan untuk eHAC yang ada di PeduliLindungi, servernya berada di pusat data nasional dan terjamin pengamanannya oleh lembaga terkait yakni Kominfo dan BSSN.

Dia pun menegaskan bahwa dugaan kebocoran data ini tak ada kaitannya dengan PeduliLindungi. Terkait kabar ini, pihak kementerian dan lembaga terkait dengan melakukan investigasi lanjutan. Anas menambahkan, dugaan kebocoran ini kemungkinan terjadi pada pihak mitra dari Kemenkes.

Oleh sebab itu, ia meminta agar masyarakat tak lagi menggunakan aplikasi lama tersebut dan segera menghapusnya. Aplikasi tersebut bisa digunakan melalui PeduliLindungi. "Pemerintah juga meminta kepada masyarakat untuk menghapus, menghilangkan, atau men-delete atau uninstall aplikasi eHAC yang lama yang terpisah," pungkas Anas.

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri ikut turun tangan menyelidiki kasus dugaan kebocoran

data aplikasi ini. "Ya, sedang bantu laksanakan penyelidikan," kata Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (31/8).

Perkara tersebut tengah diselidiki oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Namun Argo belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai proses penyelidikan kasus ini. "Secara teknis biarkan penyidik cyber bekerja," tandas dia.

Kemenkes mengatakan kebocoran data itu belum 100 persen dipastikan dan terbukti. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Widyawati menyatakan, sejauh ini Kemenkes masih melakukan penelusuran dan belum bisa membenarkan bahwa data pribadi yang diduga bocor itu memang dari eHAC.

"Ini adalah baru dugaan kebocoran. Karena sebuah insiden kebocoran baru 100 persen bisa dikatakan bocor jika sudah ada hasil audit digital forensik," kata Widyawati.

Coreng Indonesia

Pengamat Keamanan Siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menuturkan, kasus dugaan kebocoran data pribadi e-HAC telah mencoreng nama Indonesia di mata dunia. Pasalnya e-HAC diwajibkan untuk diunduh bagi orang asing yang masuk ke Indonesia. "Artinya kita menyatakan bertanggung jawab dan mampu mengamankan informasi yang diberikan. Catatan merah juga perlu diberikan kepada tim teknologi informasi Kemkes yang dikontak, tetapi tidak ada tanggapan sampai berminggu-minggu," kata Alfons di Jakarta.

Menurut Alfons, CERT (Computer Emergency Response Team) Indonesia juga harus ikut bertanggung jawab, karena telah di kontak dan di informasikan tetapi tidak memberikan tanggapan sama sekali pada waktunya.

"Apa bedanya e-HAC lama dengan e-HAC baru? Kalau mengelola database yah artinya bertanggung

jawab mengamankannya. Ini database penting di umbar di internet dan tidak dienkripsi," tegas Alfons.

Alfons mengatakan, terdapat dua poin penting dalam kasus ini. Pertama, tidak mengamankan data dan akses dengan benar. Kedua, data di internet yang tidak dienkripsi.

"Kalau ada peretas jahat, mereka mengubah data hasil tes, bisa dibayangkan kekacauan yang potensial terjadi di masa pandemi ini. Misal, database orang positif diganti negatif atau sebaliknya. Semoga hal ini juga menjadi perhatian dan prioritas Pedulilindungi," tandas Alfons.

RUU Terganjil

Pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih terkendala. Kendala penyusunan UU tersebut berada pada pasal mengenai lembaga otoritas yang mengawasi PDP. Terdapat perbedaan pendapat mengenai struktur lembaga tersebut.

"Kendala utama itu saja, pasal yang lain tidak ada perbedaan signifikan," ujar Anggota Komisi I DPR RI Sukamta.

DPR mendesak agar lembaga pengawas PDP bersifat independen. Hal itu mengingat posisi pemerintah dalam PDP juga sebagai pihak yang mengelola data. Oleh karena itu, potensi kebocoran pelanggaran PDP juga dapat terjadi pada sisi pemerintah. Selain itu, dengan menempatkan lembaga otoritas PDP secara independen, diyakini dapat membuat lembaga tersebut bekerja lebih optimal. "Kami ingin lembaga pengawas PDP independen, supaya lembaga ini bisa bekerja secara optimal," terang Sukamta.

Sebagai informasi, Ketua DPR RI Puan Maharani menargetkan pembahasan RUU PDP dapat rampung dalam masa sidang I tahun 2021. Pembahasan RUU PDP telah dilakukan sejak September 2020. (ist,ins)

RUU PDP :JENIS DATA PRIBADI YANG HARUS DILINDUNGI

72 PASAL DAN 15 BAB ISI RUU PDP

24 JANUARI 2020 RUU PDP DITANDA TANGANI PRESIDEN

TAHUN 2021 TARGET RUU PDP SELESAI

DATA PRIBADI BERSIFAT UMUM

- Nama Lengkap
- Jenis Kelamin
- Kewarganegaraan
- Agama
- Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang



DATA PRIBADI BERSIFAT SPESIFIK

- Data & Informan Kesehatan
- Data Biometrik
- Data Genetik
- Orientasi Seksual
- Pandangan Politik
- Catatan Kejahatan
- Data aAna
- Data Keuangan Pribadi
- Data Lain Sesuai Peraturan UU



NOW!!!

TOLAK GUGATAN PEGAWAI KPK NON-AKTIF, MK SEBUT TWK SAH DAN KONSTITUSIONAL

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pasal alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang diajukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide.

MK menyatakan gugatan untuk membatalkan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C tersebut tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya, MK menolak seluruh gugatan pemohon. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang putusan yang disiarkan kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Selasa (31/8).

MK memberi sejumlah pertimbangan dalam putusan tersebut. Mahkamah menilai pasal 69B ayat 1 dan 69C tidak bertentangan menurut hukum. MK menolak argumen-argumen pemohon soal TWK KPK tidak memenuhi hak atas pekerjaan dan hak atas kesempatan yang sama di pemerintahan. Menurut MK, aturan hukum tetap berlaku dalam pemenuhan hak-hak itu.

"Mahkamah berpendapat bahwa pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, terlebih jika kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut menyangkut pengisian jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat," ucap MK.

Dalam putusan itu, terdapat empat orang hakim konstitusi yang me-

nyampaikan pendapat berbeda (concurring opinion). Empat orang itu adalah Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Merespons hal itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berkata bahwa pihaknya kini tinggal menunggu hasil putusan Mahkamah Agung (MA). Saat ini, seperti diketahui, MA tengah menguji Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 yang menjadi dasar pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Kan masih ada permohonan uji materi di MA. Ya kami juga menunggu putusan MA," kata Alex dalam keterangannya, Selasa (31/8).

Sebab, dijelaskan Alex, pengujian Perkom 1/2021 di MA untuk menentukan sah atau tidaknya TWK.KPK, lanjutnya, belum mau memberikan sikap terkait pelaksanaan TWK itu karena masih dalam gugatan di MA. "Biar tuntas sekalian. Karena yang di MA menyangkut perkom yang menjadi dasar sah tidaknya TWK," kata Alex.

Komentar Novel

Bagaimana tanggapan penyidik senior KPK Novel Baswedan? "Meskipun MK telah putusan bahwa TWK konstitusional, bukan berarti jika ada pelanggaran dalam proses TWK kemudian dibenarkan kan ya? Ini dengan mengikuti logika putusan MK," kata Novel kepada wartawan, Selasa (31/8).

Novel menyebut, berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Komnas HAM,



Sidang MK memutuskan menolak gugatan terkait TWK KPK, Selasa (31/8/2021).

TWK pegawai KPK ditemukan banyak perbuatan melanggar hukum dan HAM. Menurutnya, pelanggaran hukum dan HAM itu bertujuan untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK.

"Dari hasil pemeriksaan mendalam yang dilakukan oleh ORI dan Komnas HAM, ditemukan bahwa banyak perbuatan melanggar hukum dan HAM yang dilakukan dengan maksud penyingkiran terhadap 75 pegawai KPK," ucapnya. "Tentunya itu masalah yang berbeda dengan pemeriksaan di MK," tambahnya.

Polemik peralihan pegawai KPK menjadi ASN muncul usai gelaran TWK yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama sejumlah instansi lain. Sebanyak 75 pegawai lembaga antirasuah dinyatakan tak memenuhi syarat, sementara 1.271 orang lainnya

dianggap memenuhi syarat.

Ketua KPK Firli Bahuri lantas melantik 1.271 orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai ASN pada 1 Juni lalu. Sedangkan 75 pegawai yang dinilai tak memenuhi syarat tak dilantik. Keputusan terbaru, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu dicap sudah 'merah' dan tak bisa bergabung lagi dengan KPK. Sedangkan 24 lainnya masih bisa menjadi ASN asal mau mengikuti diklat bela negara.

Dari 24 pegawai yang masih bisa dibina, hanya 18 yang bersedia ikut diklat bela negara. Mereka pun segera diangkat menjadi ASN. Sementara itu, 57 pegawai lainnya, termasuk Novel Baswedan masih nonaktif dan terancam meninggalkan KPK sebelum November 2021. (ist)

TENTANG GUGATAN TWK KE MK

Gugatan mempersoalkan UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang per-alihan pegawai KPK.



Pasal 69B

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 69C

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tuntan Penggugat mengubahnya menjadi:

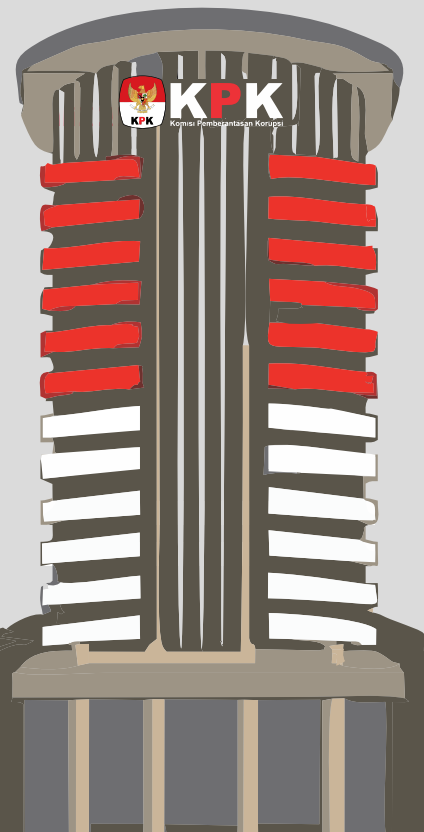


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan

Putusan MK



Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.



JEJAK POLEMIS

TWK KPK

- TWK oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama sejumlah instansi lain menyatakan 75 pegawai KPK tak memenuhi syarat, sementara 1.271 orang lainnya dianggap memenuhi syarat.
- Ketua KPK Firli Bahuri lantas melantik 1.271 orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai ASN pada 1 Juni lalu. Sedangkan 75 pegawai yang dinilai tak memenuhi syarat tak dilantik.
- Keputusan diubah, sebanyak 51 dari 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan itu dicap sudah 'merah' dan tak bisa bergabung lagi dengan KPK. Sedangkan 24 lainnya masih bisa menjadi ASN asal mau mengikuti diklat bela negara.
- Dari 24 pegawai yang masih bisa dibina, hanya 18 yang bersedia ikut diklat bela negara. Mereka pun segera diangkat menjadi ASN. Sementara itu, 57 pegawai lainnya, termasuk Novel Baswedan masih nonaktif dan terancam meninggalkan KPK sebelum November 2021.

